

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN

Oleh : Sitti Mania\*

**ABSTRACT:** *The Indonesian society which, in fact, consists of different ethnic groups, religions, languages, and cultures becomes a main reason why multicultural education is of great importance. Multicultural education is originally the study of intercultural and multiculturalism. The nature of multicultural education is democracy, humanism and pluralism which, of course, not in line with authoritarianism which controls and oppresses human to freedom. The strategy and concept of multicultural education is to make different aspects of students such as ethnic group, culture, language, religion, social status, gender, ability, and age, to be a shared value. This is designed for students to realize the importance of being humane, pluralistic and democratic.*

**KEYWORDS:** *Pendidikan, multikultural, keragaman*

**DUNIA** saat ini terasa makin sempit. Demikian gambaran futurologi John Naisbit dan Alvin Tofler. Hal senada dikemukakan oleh ahli komunikasi Kanada, McLuhan, bahwa dunia merupakan suatu kampung besar (*global Village*). Di era globalisasi dewasa ini, kita tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan global. Gelombang globalisasi bukan hanya membawa nilai-nilai positif, tetapi juga mengandung bahaya perpecahan. Samuel P. Huntington meramalkan akan terjadinya benturan antarperadaban. Benturan itu disinyalir akibat beberapa faktor: politik, sosial, budaya, ekonomi, ras, dan agama.

Melihat fenomena tersebut, pendidikan di Indonesia haruslah peka menghadapi arus perputaran globalisasi. Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan agama. Maka pencarian bentuk pendidikan alternatif mutlak diperlukan, yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi ber-

---

\*Kandidat doktor dalam bidang Evaluasi Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta ini adalah dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

ikutnya, menumbuhkan tata nilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling memahami. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural adalah jawaban atas beberapa problematika kemajemukan itu.

Pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun Negara.<sup>1</sup> Tulisan ini akan menguraikan wacana tafsir yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengembangkan pendidikan tersebut di kalangan umat yang mau tidak mau harus melakukan transformasi menjadi masyarakat demokratis.

### **Konsep Pendidikan Multikultural**

Multikultur merupakan suatu tantangan yang mengedepankan majemuknya nilai-nilai, mekanisme dan struktur sosial dalam bingkai *human being*. Dalam kesadaran pluralisme manusia dihadapkan pada proses pembelajaran yang terus menerus bergulir sepanjang hidupnya terhadap sesuatu di luar pribadi dan identitas monokulturnya.<sup>2</sup> Dalam kedua konteks itu (manusia dan multikultur), banyak perbenturan yang bisa terjadi. Tetapi itu adalah *impact* yang tidak bisa dihindari karena yang mau dicairkan adalah manusia sebagai realitas-realitas *human being* manusia sebagai yang berakal budi.

Pentingnya pendidikan multikultural menjadi lebih urgen ketika dilihat dari realitas kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai perbedaan suku, agama, bahasa dan budaya. Jumlah penduduk hampir mencapai 210 juta jiwa, dengan kandungan budaya diantaranya 13.000 pulau besar dan kecil, 300 suku yang menggunakan bahasa hampir mencapai 210 jenis bahasa, dengan beberapa agama, masih ada ribuan aliran sekte mulai yang dapat diterima masyarakat, sampai dengan aliran yang dianggap sesat (meskipun terminologi sesat itu masih dalam pro-kontra). Apakah ada hubungan kausalitas atau tidak, antara kebhinekaan bangsa Indonesia dengan potensi konflik, tetapi dalam kurun waktu sekitar 50 tahun, pertumpahan darah dan konflik terjadi secara hampir berurutan. Diawali dari peristiwa G.30. S/PKI, dimana peristiwa tersebut masih menjadi pertanyaan besar masyarakat. Kekerasan etnis China di Jakarta tahun 1998. Konflik antara Islam-Kristen Maluku tahun 1999-2003, konflik suku antara Dayak dan Madura tahun 2000 dan konflik suku di Papua yang menelan korban ratusan jiwa. Semua ini secara hipotesis dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang mampu menerima perbedaan.

Jika ditilik dari sisi konteks pendidikan, semua persoalan masyarakat akan bisa diperbaiki melalui proses pendidikan. Artinya kegagalan masyarakat adalah kegagalan pendidikan dan sebaliknya. Dengan demikian, kalau ingin mengatasi segala problematika masyarakat dimulai dari penataan secara sistemik dan metodologis dalam pendidikan, sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran. Untuk memperbaiki realitas masyarakat, perlu dimulai dari proses pembelajaran. Multikultural bisa dibentuk dengan menggunakan pembelajaran berbasis multikultural. Yaitu proses pembelajaran yang lebih mengarah pada upaya menghargai perbedaan diantara sesama manusia sehingga terwujud ketenangan dan ketentraman tatanan kehidupan masyarakat.

Apakah sebenarnya pendidikan multikultural itu? strategi pendidikan multikultural telah lama berkembang di Amerika, Eropa dan negara-negara maju lainnya. Dengan demikian wacana tentang pendidikan multikultural bukanlah hal baru. Strategi ini merupakan pengembangan dari studi interkultural dan multikulturalisme.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya, studi ini menjadi sebuah studi khusus tentang pendidikan multikultural yang pada awalnya bertujuan agar populasi mayoritas dapat bersikap toleran terhadap para imigran baru. Di samping itu, memiliki tujuan politis sebagai alat kontrol sosial penguasa terhadap warganya agar kondisi negara aman dan stabil.<sup>4</sup> Namun dalam perkembangannya, tujuan politis ini hilang karena ruh pendidikan multikultural adalah demokrasi, humanisme dan pluralisme yang anti terhadap adanya kontrol dan tekanan yang membatasi dan menghilangkan kebebasan manusia. Pendidikan multikultural selanjutnya menjadi motor penggerak dalam menegakkan demokrasi, humanisme dan pluralisme yang dilakukan melalui sekolah, kampus dan institusi-institusi pendidikan lainnya.

James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*.<sup>5</sup> Artinya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (*sunnatullah*), kemudian bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter. Hilda Hernandez mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-kecualian dalam proses pendidikan.

Pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap "*indifference*" dan "*Non-recognition*" tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi para-

digma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang "*ethnic studies*" untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah bentuk pendidikan yang menerapkan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras. Dan yang paling penting, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis.

Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokratis dan pluralitas, kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu: *pertama*, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. *Kedua*, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. *Ketiga*, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. *Keempat* pendidikan dwi-budaya. *Kelima*, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Dalam konteks sejarah, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan yang kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi, dan intelektual yang mendorong kemunculannya.<sup>6</sup>

James Banks<sup>7</sup> menjelaskan, bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain", yaitu: *Pertama*, *Content integration*, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan

kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Kedua, *the knowledge construction process*, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin). Ketiga, *an equity paedagogy*, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya (*culture*) ataupun sosial. Keempat, *prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.

Sebagai negara berkembang, menjadikan pendidikan sebagai salah satu sarana strategis dalam upaya membangun jati diri bangsa adalah sebuah langkah yang bagus, relatif tepat, dan menjanjikan pendidikan yang layak dan kelihatannya tepat dan kompatibel untuk membangun bangsa kita adalah dengan model pendidikan multikultural. Berkaitan dengan hal ini, maka pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras.<sup>8</sup> Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

Pertama, pendidikan multikultural secara *inhern* sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. Falsafah bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, suka gotong royong, membantu, dan menghargai antar satu dengan yang lainnya, betapa dapat dilihat dalam potret kronologis bangsa ini yang sarat dengan masuknya berbagai suku bangsa asing dan terus berakulturasi dengan masyarakat pribumi, misalnya etnis Cina, etnis Arab, etnis Eropa, etnis Afrika dan sebagainya. Semua suku itu ternyata secara kultural telah mampu beradaptasi dengan suku-suku asli negara Indonesia. Misalnya suku Jawa, Batak, Minang, Bugis, Ambon, Papua, Suku Dayak, dan Suku Sunda. Proses adaptasi dan akulturasi yang berlangsung di antara suku-suku tersebut dengan etnis yang datang kemudian itu, ternyata sebagian besar dilakukan dengan damai tanpa adanya penindasan yang berlebihan. Proses inilah yang dikenal dengan pendidikan multikultural.

Kedua, pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini, mengingat pendidikan multikultural adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, heterogenitas, pluralitas dan keragaman, apapun aspeknya dalam masyarakat.

Ketiga, pendidikan multikultural menentang pendidikan yang berorientasi bisnis. Pada saat ini, lembaga pendidikan baik sekolah atau perguruan tinggi berlomba-lomba menjadikan lembaga pendidikannya sebagai sebuah institusi yang mampu menghasilkan *income* yang besar. Alasannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peserta didik. Padahal semua orang tahu, bahwa pendidikan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia bukanlah pendidikan keterampilan belaka, melainkan pendidikan yang harus mengakomodir semua jenis kecerdasan yang sering dikenal dengan nama kecerdasan ganda (*multiple intelligence*).

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang barangkali perlu dikaji dan direnungkan ulang bagi subjek pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan model pendidikan multikultural. Yaitu pendidikan yang mampu mengakomodir sekian ribu perbedaan dalam sebuah wadah yang harmonis, toleran, dan saling menghargai.

Dengan demikian Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dimensi lain pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktifitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non eropa.<sup>9</sup>

Perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter militeristik orde baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasa perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultural untuk menangkal semangat primordialisme.<sup>10</sup> Paradigma pendidikan multikultural dalam konteks ini memberi pelajaran kepada kita untuk memiliki apresiasi respek terhadap budaya dan agama-agama orang lain. Atas dasar ini maka penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian. Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari pasal 4 UU RI No.20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Namun ada satu hal yang mesti diperhatikan dalam mendesain pendidikan multikultural di Indonesia yang tatanan masyarakatnya penuh permasalahan antar kelompok, budaya, suku, dan agama yang mengan-

dung tantangan yang tidak ringan. Dalam kondisi demikian, pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan beberapa pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah:

1. Pandangan pendidikan (*education*) harus dibedakan dari pandangan persekolahan (*schooling*).
2. Pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik harus dihindari.
3. Karena pengembangan kompetensi dalam suatu “kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, maka dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural.
4. Pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi itu ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional.
5. Kemungkinan bahwa pendidikan, baik formal maupun non formal meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non pribumi.<sup>11</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, H.A.R. Tilaar mengajukan beberapa pokok pikiran berkaitan dengan pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Menurutnya pendidikan multikultural mempunyai dimensi sebagai berikut:

1. *Right to culture* dan identitas budaya lokal. Multikulturalisme meskipun didorong oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia, namun akibat globalisasi pengakuan tersebut diarahkan juga kepada hak-hak yang lain yaitu hak akan kebudayaan. Pendidikan multikultural di Indonesia haruslah diarahkan kepada terwujudnya masyarakat madani di tengah-tengah kekuatan kebudayaan global.
2. Kebudayaan Indonesia yang menjadi. Hal ini harus menjadi pegangan dari setiap insan dan identitas budaya mikro Indonesia. Sebagai suatu pegangan, hal tersebut merupakan suatu sistem nilai yang baru yang memerlukan suatu proses perwujudan antara lain melalui proses dalam pendidikan nasional.
3. Konsep pendidikan multikultural normatif. Konsep ini dapat digunakan untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu Negara-bangsa. Namun untuk mewujudkannya kita jangan jatuh pada kekeliruan-kekeliruan masa lalu yang menjadikan konsep multikultural normatif sebagai suatu paksaan dengan menghilangkan keanekaragam-

an budaya-budaya lokal. Pendidikan multikultural normatif justru memperkuat identitas suatu suku yang kemudian dapat menyumbangkan bagi terwujudnya suatu kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia.

4. Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial. Ini mengandung arti bahwa pendidikan multikultural berupaya untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada dewasa ini. Mengingat rasa kesukuan yang berlebihan dapat melahirkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan bangsa yang pluralistik, maka pendidikan multikultural memainkan peran pentingnya di sini.
5. Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru. Untuk melaksanakan konsep pendidikan multikultural di dalam masyarakat pluralistik, pedagogik yang tradisional tidak dapat digunakan lagi, karena pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan di dalam ruangan sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik. Sedangkan kehidupan sosial-budaya di Indonesia menuntut pendidikan hati yang diarahkan kepada rasa persatuan dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Pedagogik baru yang dibutuhkan ialah: 1) pedagogik pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*), 2) pedagogik kesetaraan sesama manusia dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*).
6. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Dalam kaitan ini perlu dipertimbangkan menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti terutama di tingkat pendidikan dasar yang melengkapi pendidikan agama.<sup>12</sup>

Dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda, dan yang terpenting dari strategi pendidikan multikultural ini tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokrasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan multikulturalisme mempunyai beberapa ciri: (1) bertujuan membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya. (2) materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis, (3) metodenya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis, (4) evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.

## Implementasi Pendidikan Multikultural di Indonesia

Dari konsep pendidikan multikultural yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa untuk mencapai nilai-nilai multikultural bisa berdasarkan pada tiga sumber, yaitu konsep mengenai kebutuhan peserta didik, konsep mengenai kebutuhan masyarakat, dan konsep mengenai peranan dan status mata pelajaran yang akan disampaikan. Dari prinsip-prinsip tersebut disusunlah suatu rumusan mengenai tujuan pendidikan multikultural. Dari tujuan pendidikan inilah direncanakan kurikulum dan keputusan-keputusan instruksional yang akan dilaksanakan. Perencanaan kurikulum meliputi pemilihan mata pelajaran yang akan disajikan, kemudian dirumuskan mengenai tujuan instruksional yang akan dicapai dengan mata pelajaran tersebut. Sumber-sumber apa yang diperlukan dan rencana evaluasi dari mata pelajaran yang bagaimana yang sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Dalam keputusan instruksional meliputi persiapan peserta didik untuk menyerap mata pelajaran, misalnya di dalam membangkitkan perhatian peserta didik, diagnosis proses pembelajaran dan hubungan-hubungannya dengan mata pelajaran yang disajikan. Demikian pula cara-cara penyampaian pelajaran, yaitu informasi apa yang akan diberikan, contoh-contoh apa yang perlu disajikan dan mengecek kembali pengertian yang diharapkan diperoleh peserta didik. Keputusan instruksional juga meliputi petunjuk-petunjuk praktis dalam pelaksanaannya. Begitu pula dengan petunjuk-petunjuk yang khas untuk setiap mata pelajaran yang akan disajikan.

Dari uraian di atas mungkin timbul pertanyaan apakah pendidikan multikultural disajikan sebagai mata pelajaran ataukah merupakan suatu bentuk penyajian yang terintegrasi? Menjawab persoalan tersebut, sebaiknya pendidikan multikultural tidak diberikan dalam suatu mata pelajaran yang terpisah, tetapi terintegrasi di dalam suatu mata pelajaran yang relevan. Dalam mata pelajaran ilmu sosial, mata pelajaran bahasa, tujuan yang telah dirumuskan mengenai pendidikan multikultural dapat dicapai tanpa memberikan suatu mata pelajaran tertentu. Di dalam mata pelajaran kewarganegaraan (*civic education*) ataupun pendidikan moral (*moral education*) merupakan wadah untuk menampung program-program pendidikan multikultural.

Menurut Bunnet sebagaimana ditulis Azyumardi Azra,<sup>13</sup> pendidikan multikultural itu memiliki tiga macam program yang dapat diterapkan oleh sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. *Pertama*, program yang berorientasi pada materi (*content-oriented programs*) yang merupakan

bentuk pendidikan multikultural yang paling umum dapat cepat dipahami, tujuan utamanya adalah memasukan materi tentang kelompok budaya yang berbeda dalam kurikulum dan materi pendidikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan siswa mengenai kelompok-kelompok tersebut. Dalam bentuknya yang paling sederhana bentuk program ini menambahkan aspek multikultural ke dalam kurikulum yang standar. Versi yang lebih canggih dari bentuk ini yaitu mengubah kurikulum secara aktif dengan tiga tujuan: 1) mengembangkan muatan multikultural melalui berbagai disiplin. 2) memasukkan sejenis sudut pandang dan perspektif yang berbeda dalam kurikulum. 3) mengubah aturan, yang pada akhirnya mengembangkan paradigma baru bagi kurikulum.

*Kedua*, program yang berorientasi siswa (*student-oriented programs*), yang dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi akademik kelompok siswa yang berbeda, meskipun ketika itu mereka tidak memberikan perubahan besar dalam muatan kurikulum. Beberapa program ini tidak dirancang untuk mengubah kurikulum atau konteks sosial pendidikan, melainkan membantu siswa dengan budaya dan bahasa yang berbeda untuk menciptakan perubahan dalam *mainstream* pendidikan, terdapat beberapa kategori program yang khas: 1) program yang menggunakan riset dalam model belajar yang berbasis budaya (*culturally-based learning styles*) dalam menentukan gaya mengajar mana yang digunakan pada kelompok siswa tertentu; 2) program dua bahasa (*bilingual*) atau dua budaya (*bicultural*); 3) program bahasa yang mengandalkan bahasa dan budaya sekelompok siswa minoritas.

*Ketiga*, program yang berorientasi sosial (*socially-oriented programs*) yang berupaya mereformasi pendidikan maupun konteks politik dan budaya pendidikan, yang bertujuan bukan untuk meningkatkan prestasi akademik atau menambah sekumpulan pengetahuan multikultural, melainkan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan toleransi budaya dan ras serta mengurangi bias. Di samping itu, kategori program ini tidak hanya meliputi program yang dirancang untuk menstrukturkan kembali dan menyatukan sekolah, tetapi juga program ini dirancang untuk meningkatkan semua bentuk hubungan di kalangan kelompok etnik dan ras dalam program belajar bersama tanpa membedakan perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap individu. Bentuk pendidikan multikultural ini menekankan 'hubungan manusia' dalam semua bentuknya, dan menggabungkan beberapa karakteristik dua bentuk program lainnya; yaitu: program yang menuntut perbaikan kurikulum dalam rangka menekankan kontribusi sosial yang positif dari kelompok etnis dan

budaya, sambil menggunakan riset tentang model belajar untuk meningkatkan prestasi siswa dan mengurangi ketegangan dalam ruang kelas.

Dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di Indonesia memang bukan sesuatu yang *taken for granted* atau *trial and error*, tetapi butuh kerja keras dan perjuangan yang panjang. Hal ini dikarenakan Indonesia baru memulai pendidikan multikultural ini, untuk itu diperlukan suatu rujukan dari beberapa negara yang memang sudah menerapkan pendidikan multikultural di negaranya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Dede Rosyada bahwa prosedur yang harus ditempuh dalam implementasi pendidikan multikultural di Indonesia adalah penyiapan kurikulum yakni menyisipkan berbagai kompetensi yang harus dimiliki siswa tentang multikulturalisme pada mata pelajaran yang relevan, karena multikulturalisme baru hanya sebuah gerakan dan belum menjadi sebuah ilmu yang komprehensif.

## **Penutup**

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa pembelajaran multikultural adalah sebuah model pembelajaran dengan ciri sebagai berikut:

*Pertama*, falsafah yang digunakan adalah falsafah teori belajar humanistik, dan konstruktivistik.

*Kedua*, cara kerja yang dipakai dalam proses pembelajaran multikultural adalah dilakukan dengan cara memberikan kesempatan munculnya ide atau gagasan dari siswa. Pemunculan gagasan atau ide dikemas dengan suasana yang menyenangkan atau tidak menakutkan, siswa belajar dengan cara kelompok (*group*), guru lebih banyak mengamati perilaku atau aktivitas siswa dalam berekspresi terhadap ide atau gagasannya.

*Ketiga*, sumber materi tidak hanya dihasilkan dari guru, tetapi berasal dari semua realitas yang ada disekitarnya. Peran guru hanya sekedar fasilitator, mediator dan memberdayakan sarana pembelajaran agar dapat dijadikan sarana untuk mengoptimalkan pengetahuan dan pemahaman siswa.

*Keempat*, evaluasi tidak hanya dilaksanakan secara instan, evaluasi harus dilakukan secara simultan, utuh dan komprehensif, artinya evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar siswa memahami dan menguasai materi dari guru, tetapi evaluasi juga dimaksudkan untuk sarana evaluasi terhadap kekurangan dan kelemahan guru, sebagai acuan perbaikan kurikulum, dan sarana untuk memperbaiki segala kebijakan dalam pembelajaran.

Pendidikan multikultural sebagai pembina siswa agar tidak tercabut dari akar budayanya selain sebagai sarana alternatif perpecahan konflik yang dimiliki realitas sosial dan budaya, pendidikan multikultural juga sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan sebagai titik tolak dalam proses pembelajaran.

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis akhirnya merekomendasikan beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh pembuat kurikulum, penulis *text book* dan guru dalam rangka mewujudkan pendidikan multikultural di Indonesia:

1. Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Untuk tingkat dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme haruslah diubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat bangsa, dan dunia. Filosofi kurikulum yang progresif seperti humanism, dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan landasan pengembangan kurikulum.
2. Teori kurikulum tentang konten haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang bersifat fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh generasi muda.
3. Teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan siswa dalam suatu kondisi *value free*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik dan hidup sebagai anggota aktif dalam masyarakat, bangsa dan dunia.
4. Proses belajar yang dikembangkan untuk siswa haruslah didasarkan pada proses yang memiliki tingkat *isomorphism* yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya proses belajar yang mengandalkan siswa belajar individualistik harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi positif. Dengan demikian perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi dan lain-lain.
5. Evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan.

Di samping perlunya memperhatikan langkah-langkah di atas, pendidik harus sadar betul bahwa masing-masing peserta didik merupakan manusia yang unik, karena itu tidak boleh ada penyeragaman-penyeragaman. Memang bukan pekerjaan mudah, tidak semudah membalik telapak tangan, oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak.

#### CATATAN AKHIR

1. James A. Banks, *An Introduction to Multicultural Education*, Boston: Allyn & Bacon, 2001, h. 28.
2. John D. Barndorf, *How People Learn: Brain, Main, Experience and School*, Washington DC: National Academy Press, 2000, h. 25.
3. H. A. R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 2004, h. 122-125.
4. Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, London: MacMillan Press, 2000, h. 10.
5. James A. Banks and Cheryl A. McGee, *Multicultural Education*, USA: Allyn and Bacon, 1993, h. 3.
6. Thomas J. La Belle & Chistopher Ward, *Multiculturalism and Education*, Albany: Suny Press, 1994, h. 44.
7. Banks dalam Chistopher E. Renner, *Multicultural Methodologies in Second Language Acquisition: Integreting Global Responsibility, Peace Education and Cross Cultural Awerness*, <http://www.midtesol.org./articles/peediti.htm>. didownload pada tanggal 12 Mei 2010.
8. H.A.R. Tilaar, *op.cit.*, h. 23.
9. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, h. 34.
10. *Ibid*, h. 56.
11. Chaerul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 192-193.
12. H.A.R. Tilaar, *op. cit.*, h. 185-190.
13. Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Millinium baru*, Jakarta: Penerbit Kalimah, 2001.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Millinium baru*, Jakarta: Penerbit Kalimah, 2001.
- Bank, James A., and Cherry A. McGee, *Multikultural Education*, USA: Allyn & Bacon, 1993.
- Banks, James A., *An Introduction to Multikultural Education*. Boston : Allyn & Bacon. 2001.
- Barndorf, John D., *How People Learn: Brain, Main, Experience and School*, Washington DC: National Academy Press, 2000.
- Choerul, Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- La Belle, Thomas J., & Chistopher Ward, *Multiculturalism and Education*, Albany: Suny Press, 1994.
- Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, London: MacMillan Press, 2000.
- Renner, Christopher E., *Multikultural Methodologies in Second Language Acquisition: Integreting Global Responsibility, Peace Education and Cross Cultural Awerness*, <http://www.midtesol.org/articles/peediti.htm>.
- Sumartana, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2001.
- Suyanto, *Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.
- Tilaar, H.A.R., *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.
- Yaqin, Ainul, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.